

Pengaruh Pengangguran, Pembangunan Manusia, dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Provinsi Papua

Damar Jati*¹, Sodik Dwi Purnomo², Diah Retnowati³, Zumaeroh⁴
^{1,2,3,4} Faculty of Economics and Business, University of Wijayakusuma, Purwokerto

*Correspondence email: damar.74t1@gmail.com

Abstrak. Kemiskinan menjadi perhatian utama bagi seluruh pemerintah di dunia, terutama di negara-negara yang belum maju seperti Indonesia. Di Indonesia, pemerintah memprioritaskan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan. Penelitian memiliki tujuan untuk mengkaji hubungan pengaruh pengangguran, pembangunan manusia, dan upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Papua pada periode tahun 2017-2021. Data berasal dari 29 kabupaten/kota di Papua dianalisis dengan menggunakan metode regresi data panel. Tiga pendekatan estimasi yang digunakan meliputi *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Berdasarkan hasil uji pemilihan model terbaik, *random effect* dipilih sebagai model yang paling sesuai. Analisis menggunakan model *random effect* menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, berlawanan dengan hipotesis yang menyatakan pengangguran memiliki dampak positif. Selain itu, indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan upah minimum regional tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Hasil tersebut mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah harus mendorong pembangunan manusia melalui akses pendidikan dan Kesehatan yang baik.

Kata Kunci: Pengangguran; Pembangunan Manusia; Upah; Kemiskinan.

Abstract. Poverty is a major concern for governments around the world, especially in developing countries such as Indonesia. In Indonesia, the government prioritizes poverty alleviation as part of efforts to improve people's welfare. This study aims to examine the influence of unemployment, human development index, and regional minimum wage on poverty in districts/cities in Papua Province during the period 2017-2021. Data from 29 districts/cities in Papua were analyzed using the panel data regression method. The three estimation approaches used include *common effect*, *fixed effect*, and *random effect*. Based on the results of the best model selection test, *random effect* was selected as the most suitable model. The analysis using this model shows that unemployment has a negative impact on poverty, contrary to the hypothesis that unemployment has a positive impact. In addition, the human development index also has a negative influence on poverty, while the regional minimum wage has no significant effect on poverty levels.

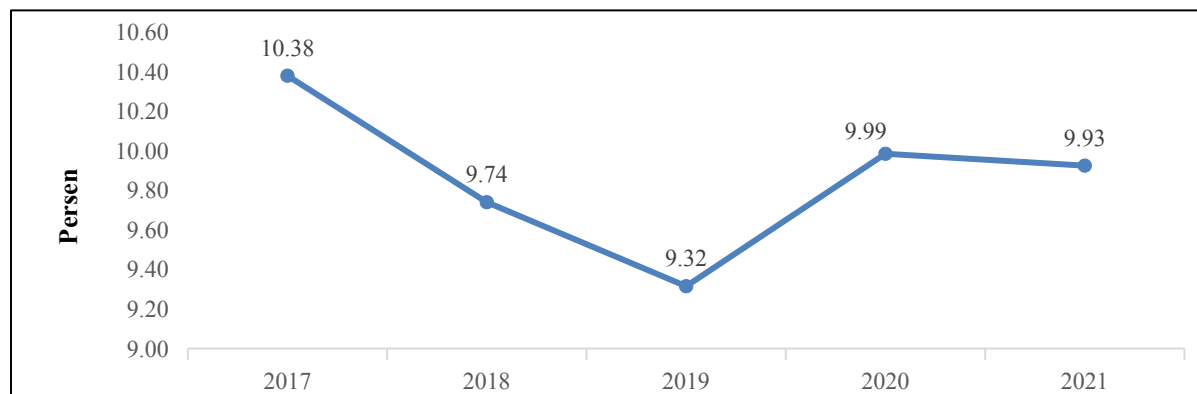
Keywords: Unemployment, Human Development, Wages, Poverty.

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan global yang dihadapi oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Indonesia (Shaleh et al., 2021). Jumlah penduduk miskin yang tinggi dapat menimbulkan beban besar bagi perekonomian makro suatu negara. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas hidup karena keterbatasan kemampuan penduduk miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh sebab itu, hampir semua pemerintahan di dunia berusaha mengurangi jumlah penduduk miskin untuk meningkatkan kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik. Sejak tahun 1990, Bank Dunia telah memberikan dukungan kepada negara-negara di seluruh dunia dengan tujuan mengurangi kemiskinan ekstrem (Konkel, 2014).

Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (2021), selama lima tahun terakhir penduduk miskin di Indonesia menunjukkan tren positif. Tahun 2017, presentase penduduk miskin berada pada level dua digit, yaitu 10,38 persen, dan kemudian menurun selama dua tahun berturut-turut menjadi 9,74 persen pada tahun 2018 dan 9,32 persen pada tahun 2019. Ditambah lagi terjadi peningkatan pada tahun 2020 menjadi 9,99 persen akibat kondisi ekonomi global yang memburuk sebagai dampak dari pandemi Covid-19, yang juga berdampak pada Indonesia. Pada 2021, ekonomi perlahan pulih dan tingkat kemiskinan berhasil sedikit ditekan menjadi 9,93 persen.

Data pada Gambar 1 menunjukkan tingkat kemiskinan secara umum di Indonesia. Jika dilihat lebih rinci berdasarkan provinsi, kemiskinan yang terjadi di Indonesia masih cukup bervariasi. Menurut Badan Pusat Statistik (2021), persentase angka kemiskinan Indonesia berdasarkan provinsi selama lima tahun terakhir berkisar antara 4,02 persen hingga 27,23 persen. Provinsi dengan tingkat kemiskinan paling rendah tercatat di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan yang paling tinggi ada di Provinsi Papua, menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan.



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021. (data diolah)

Gambar1. Grafik Tingkat Kemiskinan di Indonesia dari Tahun 2017 s.d 2021

Berdasarkan data dan tantangan yang dihadapi, penelitian tentang hal-hal yang memengaruhi tingginya tingkat kemiskinan yang di alami Provinsi Papua akan menjadi temuan yang penting untuk memecahkan permasalahan, mengingat tingginya angka kemiskinan di provinsi ini. Menurut data BPS, rata-rata tingkat kemiskinan di Papua pada periode 2017-2021 mencapai 27,23 persen.

Penelitian terdahulu telah menemukan bahwa faktor-faktor yang dapat memengaruhi kemiskinan di Indonesia, diantaranya yaitu pengangguran, IPM, dan upah minimum regional. Ipmawan et al. (2022) dalam penelitiannya menyatakan pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Pengangguran merujuk pada jumlah orang dalam usia kerja (15 hingga 65 tahun) yang belum mendapatkan pekerjaan. Stabilitas ekonomi suatu negara sering kali diukur dari rendahnya tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan manusia dan menjadi penyebab permasalahan yang paling sulit diselesaikan. Untuk sebagian besar orang, kehilangan atau tidak memiliki pekerjaan akan menurunkan kesejahteraan dan memunculkan tekanan psikologis bagi seseorang (Sessu, 2020).

Sumarsono (2013) menjelaskan bahwa ketidakcocokan antara permintaan dan pasokan di pasar tenaga kerja menjadi penyebab utama munculnya pengangguran. Kondisi ini melahirkan berbagai jenis pengangguran seperti pengangguran friksional, musiman, siklikal, struktural, dan teknologi. Artinya, ketidakselarasan antara kebutuhan tenaga kerja dan ketersediaan pekerjaan menyebabkan berbagai bentuk pengangguran yang memiliki karakteristik dan alasan yang berbeda-beda. Pengangguran menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi untuk semua provinsi di Indonesia karena penganggur tidak memiliki kontribusi bagi perekonomian akan tetapi tetap memerlukan akses ke sumber daya seperti pangan, perumahan, dan layanan kesehatan.

Selain itu, yang turut berperan dalam kemiskinan adalah pembangunan manusia (IPM) (Prasetyoningrum dan Sukmawati, 2018). IPM merupakan salah satu indikator yang mengukur keberhasilan pembangunan manusia suatu daerah dan kualitas hidup masyarakatnya. Penelitian sebelumnya secara umum menemukan bahwa IPM berkorelasi negatif dengan kemiskinan, di mana peningkatan IPM menandakan peningkatan kualitas hidup individu dan diikuti dengan penurunan angka kemiskinan (Yusuf dan Dai, 2020).

IPM terdiri dari tiga komponen utama: pendidikan, kesehatan, dan atau standar hidup. Meningkatnya tingkat pendidikan seseorang sering kali dikaitkan dengan kemungkinan peningkatan pendapatan atau gaji yang didapatkan seseorang. Jika besarnya gaji menggambarkan seberapa produktif seseorang, maka semakin banyak orang dengan pendidikan yang tinggi atau pelatihan keterampilan yang banyak, akan semakin tinggi pula produktivitas kerja mereka, yang pada akhirnya

menambah kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Komponen berikutnya yaitu kesehatan, kesehatan memainkan peran penting dalam peningkatan produktivitas dan pendapatan. Kesehatan memiliki dampak terhadap pendapatan dapat dilihat dari peningkatan partisipasi tenaga kerja saat kesehatan penduduk membaik akan semakin tinggi. Kondisi kesehatan yang lebih baik juga dapat membantu meningkatkan pendidikan dan pengembangan diri, yang pada akhirnya memberikan efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tiga aspek ini dalam IPM diharapkan dapat menurunkan kemiskinan.

Penelitian Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018); Irawan (2022) menemukan bahwa IPM memiliki koefisien negatif terhadap tingkat kemiskinan di negara Indonesia, yang berarti meningkatnya IPM seharusnya disertai dengan penurunan kemiskinan. Penelitian lain oleh Saragih et al. (2022) menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia selama periode tahun 2007-2021. Adanya temuan tersebut memperkuat hipotesis bahwa IPM suatu daerah juga akan mempengaruhi kemiskinan daerah tersebut.

Riset ini melanjutkan studi Saragih et al. (2022), yang hanya menganalisis pengaruh IPM dan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia dan belum secara spesifik pada daerah yang mengalami kemiskinan ekstrem. Dalam penelitian ini secara spesifik memilih daerah Provinsi Papua sebagai subjek penelitian dengan dasar bahwa angka IPM pada provinsi tersebut merupakan yang terendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Penelitian ini menambahkan variabel upah minimum regional untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan di Provinsi Papua. Penelitian sebelumnya oleh Sabyan & Widyanti (2022) menyimpulkan upah minimum regional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Sari (2021) juga menyebutkan bahwa upah minimum regional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan di negara berkembang adalah rendahnya pendapatan nasional, yang sering kali muncul sebagai hasil dari kebijakan upah minimum yang tidak memadai. Dampaknya adalah masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan mereka karena upah minimum yang diterima tidak mencukupi (Sulistiawan, 2023).

METODE

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif atau penelitian yang menggunakan angka dan statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Berdasarkan subjek penelitian yaitu Provinsi Papua maka sample yang digunakan dalam penelitian ini mencakup seluruh kabupaten/kota yang ada di provinsi Papua, sebanyak 29 kabupaten kota (28 kabupaten dan 1 kota). Sampel diambil dengan *purposive sampling*, yaitu memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu. Adapun persamaan regresi data panel yang digunakan untuk memodelkan penelitian ini melibatkan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, dan pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum regional sebagai variabel independen. Penelitian ini memanfaatkan data *time-series* selama 5 tahun, yaitu dari periode 2017-2021, serta data *cross-section* terdiri dari 29 Kabupaten/Kota dengan. Kombinasi antara data *time-series* dan data *cross-section* dapat dituliskan dalam persamaan matematis, sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

β_0 = *intercept*

β_1 = koefisien regresi pengangguran

β_2 = koefisien regresi indeks pembangunan manusia

β_3 = koefisien regresi upah minimum regional

Y = tingkat kemiskinan (%)

X1 = variabel pengangguran (persen)

X2 = variabel indeks pembangunan manusia (Angka Indeks)

X3 = variabel upah minimum regional (Rupiah)

ϵ_{it} = komponen *error* di waktu t untuk unit *cross-section* i

i = *cross-section*

t = *time-series*

Estimasi regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model regresi. Model yang pertama adalah *common effect model* yaitu model regresi yang sederhana karena tidak memperhitungkan unsur waktu dan individu. Kemudian model regresi berikutnya adalah *Fixed Effect Model* yaitu model yang memperhitungkan konstanta antar individu untuk menangkap perbedaan. Model yang ketiga adalah model regresi *Common Effect Model* yaitu model regresi yang mempertimbangkan adanya kemungkinan eror antar waktu dan antar individu saling berhubungan (Basuki dan Nano, 2019).

Namun, ketiga model regresi tersebut tidak secara keseluruhan dapat digunakan sebagai estimator. Dari ketiga model tersebut kemudian dipilih yang terbaik menggunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier model yang terpilih akan menjadi estimator dalam menjawab permasalahan yang ada. Selain itu beberapa uji asumsi juga dilakukan dalam penelitian ini untuk memastikan bahwa hasil regresi merupakan estimator yang terbaik dan tidak bias (*Best Linear Unbias Estimator*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum analisis hasil regresi dilakukan dalam penelitian ini terlebih dahulu dilakukan estimasi model regresi dan uji pemilihan model. Berdasarkan uji pemilihan terbaik terhadap 3 estimasi dalam analisis data panel, studi ini menunjukkan bahwa model random effect adalah yang terbaik. Dengan demikian model tersebut yang digunakan dan diinterpretasikan pada penelitian ini. Berikut ditampilkan kembali ringkasan hasil analisis dari model *random effect* untuk membentuk persamaan regresi, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis Model *Random Effect*

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
Pengangguran	-0.618942	0.244421	-2.532278	0.0124
IPM	-0.516942	0.071950	-7.184758	0.0000
UMR	-0.00000223	0.00000123	-1.217529	0.2254
Konstanta	68.09264			
F-statistic	71.95469			
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Olah Data Peneliti, 2024.

$$\text{Kemiskinan} = 68.09264 - 0.618942 \text{ Pengangguran}_{it} - 0.516942 \text{ IPM}_{it} - 0.00000223 \text{ UMR}_{it} + e_{it}$$

Dari persamaan tersebut, nilai konstanta sebesar 68.09264 menunjukkan bahwa jika nilai pengangguran, IPM, dan UMR adalah nol, maka tingkat kemiskinan diperkirakan akan berada pada angka 68,09264 persen. Koefisien hasil regresi variabel pengangguran adalah sebesar -0,618942 mengindikasikan bahwa apabila terjadi peningkatan pengangguran sebesar 1 persen tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua akan menurun sebesar 0,618942, apabila diasumsikan bahwa variabel IPM dan UMR tetap atau konstan. Hasil regresi menunjukkan bahwa koefisien variabel indeks pembangunan manusia adalah sebesar -0,516942 dimana dapat diartikan bahwa setiap peningkatan IPM sebesar 1 persen diperkirakan akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,516942 persen, dengan asumsi bahwa variabel pengangguran dan UMR tetap konstan. Sedangkan koefisien untuk variabel upah minimum regional adalah sebesar 0,00000223, namun karena hasil statistiknya tidak signifikan, koefisien regresi variabel ini tidak diinterpretasikan lebih lanjut.

Pembahasan

Pengujian hipotesis pertama dilakukan untuk menguji apakah ada pengaruh positif pengangguran terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Perhitungan uji t menunjukkan bahwa nilai t-hitung untuk variabel pengangguran adalah -2,532278, sementara t tabel adalah 1,6573, dengan nilai probabilitas sebesar 0,0124. Karena nilai t-hitung negatif dan lebih kecil dari t tabel maka hipotesis ditolak. Akan tetapi nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan juga secara statistik pengangguran berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis penelitian yang menduga bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis pertama ditolak.

Hipotesis berikutnya atau kedua untuk menguji apakah ada pengaruh negatif indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Hasil perhitungan uji t menunjukkan nilai t-hitung variabel IPM adalah sebesar -7,184758, sementara -t tabel adalah -1,65573, dengan nilai probabilitas 0,0000. Karena nilai t-hitung negatif dan signifikansi lebih kecil dari alpha 0,05, sehingga dari hasil tersebut disimpulkan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Hal ini berarti peningkatan IPM akan mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, hipotesis kedua yang menduga bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan diterima.

Hipotesis terakhir atau ketiga untuk menguji adakah pengaruh negatif upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Berdasarkan perhitungan uji t, nilai t-hitung untuk variabel UMR adalah -1,217529 dengan nilai probabilitas 0,2254. Karena nilai t-hitung lebih besar dari -t tabel dan probabilitas lebih besar dari 0,05, maka dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini UMR secara statistik tidak memiliki berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis ketiga yang menduga bahwa UMR berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua ditolak.

Hasil pengujian hipotesis secara statistik menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Artinya, di daerah-daerah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi justru menunjukkan tingkat kemiskinannya yang cenderung rendah. Temuan ini bertentangan dengan hipotesis penelitian yang mengemukakan bahwa pengangguran berdampak positif terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak. Hasil pengujian hipotesis ini didukung dengan rata-rata tingkat pengangguran di 29 Kabupaten/Kota di Papua selama periode 2017-2021 adalah 3,45 persen, sementara rata-rata tingkat kemiskinan pada periode yang sama adalah 28,88 persen. Data ini memberikan bukti bahwa meskipun tingkat pengangguran rendah, tingkat kemiskinan tetap tinggi. Data ini juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pengangguran tidak selalu berarti tingkat kemiskinan juga rendah. Namun, dengan hasil penelitian ini juga tidak dapat ditarik kesimpulan bahwa meningkatkan pengangguran adalah upaya untuk menurunkan kemiskinan. Perubahan demografi penduduk, peningkatan produktifitas dan pemerataan pendapatan justru akan mendorong suatu daerah dapat terbebas dari kemiskinan.

Hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Saragih et al. (2022), yang menyimpulkan bahwa pengangguran berdampak positif terhadap kemiskinan. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian Leonita & Sari (2019), yang menemukan bahwa pengangguran berdampak negatif terhadap kemiskinan. Mereka menjelaskan bahwa hubungan negatif ini terjadi karena meskipun orang memiliki pekerjaan, penghasilan yang mereka terima masih minim, sehingga mereka tetap dikategorikan sebagai penduduk miskin karena tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Dengan demikian, pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan upaya peningkatan IPM atau kualitas hidup manusia akan menurunkan tingkat kemiskinan pada suatu daerah. Kabupaten/Kota di Papua yang memiliki IPM yang lebih tinggi akan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang kecil atau rendah. Indeks Pembangunan Manusia selain menjadi ukuran keberhasilan pembangunan manusia pemerintah juga sebagai indikator kualitas hidup masyarakat.

Rata-rata IPM di Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua selama periode 2017-2021 adalah 56,91. Apabila kita lihat dari beberapa Kabupaten seperti Kota Jayapura, Supiori, Waropen, Keerom, Sarmi, Boven Digoel, Mimika, Biak Numfor, Kepulauan Yapen, Nabire, Jayapura, dan Merauke memiliki IPM di atas rata-rata, yaitu lebih dari 60 persen. Akan tetapi Kabupaten/Kota ini juga memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah, yaitu sekitar 20 persen, dimana angka tersebut jauh di bawah dari rata-rata tingkat kemiskinan di Papua sebesar 28,88 persen. Data ini memberikan bukti empiris bahwa peningkatan IPM sangat berperan dalam menurunkan kemiskinan di suatu daerah.

Berdasarkan pengujian hipotesis menunjukkan bahwa upah minimum regional tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa di Provinsi Papua, tingkat kemiskinan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya UMR. Data penelitian menunjukkan bahwa UMR di sebagian besar Kabupaten/Kota di Papua mengikuti upah provinsi dan relatif seragam, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut.

Dengan demikian, IPM merupakan indikator yang mengukur kesejahteraan suatu wilayah dengan memperhitungkan tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Pertama, dalam aspek kesehatan, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dan produktif, yang dapat mengurangi angka kemiskinan. Kedua, dalam aspek pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan membantu individu memperoleh keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Terakhir, dalam aspek standar hidup layak, peningkatan pendapatan per kapita dan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan perumahan layak membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, peningkatan IPM secara keseluruhan dapat berkontribusi dalam penurunan kemiskinan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan pada penelitian ini bahwa tingkat pengangguran berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua. Selain itu, indeks pembangunan manusia juga memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Sementara itu, tidak ditemukan pengaruh yang signifikan dari variabel upah minimum regional terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Papua selama periode 2017-2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, A.T., & Nano P. (2019). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ipmawan, H., Kristanto, D., Hendrawan, K., & Kuncoro, A. W. (2022). The Influence of The Human Development Index, Unemployment Rate, and Illiteracy Population on Poverty Level in Indonesia for the Period 2015-2020. *MUHARRIK: Jurnal Dakwah dan Sosial*, 5 (1), 89–103. <https://doi.org/10.37680/muharrik.v5i1.1372>
- Irawan, E. (2022). The Effect of Unemployment, Economic Growth and Human Development Index on Poverty Levels in Sumbawa Regency in 2012-2021. *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal*, 6 (2), 950–957.
- Konkel, R. (2014). The Monetization of Global Poverty: The Concept of Poverty In World Bank History, 1944–90. *Journal of Global History*, 9 (2), 276–300.
- Leonita, L., & Sari R.K. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3 (2), 1–8.
- Prasetyoningrum, A.K., & Sukmawati, U.S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6 (2), 217–240.
- Sabyan, M & Widyanti, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. *Menara Ekonomi*, 3 (3), 311–315.
- Saragih, R.F., Silalahi P.R., & Tambunan K. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2007–2021. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora*, 1 (2), 71–79.
- Sari, Y.A. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium*, 10 (2), 121–130.

- Sessu, Andi. (2020). Correlation Analysis Between Production Level, National Income, Investment, Unemployment and Poverty in Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, Vol. 24, Issue 03, page 1730-1740.
- Shaleh, M., Mallongi S., & Rahman Z. (2021). Pengaruh Pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur. *TATA KELOLA: Jurnal Magister Manajemen Universitas Muslim Indonesia*, 8 (2), 143–167.
- Sulistiawan, A. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Pulau Jawa. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7 (1), 115–126.
- Sumarsono, S. (2013). *Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yusuf, L.A., & Dai I. (2020). The Impact of Unemployment and Human Development Index on Poverty in Gorontalo Province 2008-2017. *Jembura Equilibrium Journal*, 2 (1), 7–16.